



Friday, 19 February 2016

Diduga Dana SOLID Kelompok Pertanian Bursel Disunat

Namrole - Diduga, dana Solid bagi 130 kelompok pertanian di Kabupaten Buru Selatan (Bursel) disunat, oleh oknum-oknum di Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan kabupaten setempat.

Sejumlah oknum BKPP Bursel tersebut diduga terlibat dalam aksi penyunatan dana Solid bernilai ratusan juta rupiah, dengan cara menyetor anggaran sebesar sebesar

Rp 5.400.000 pasca pencairan anggaran kepada para oknum-oknum tersebut.

“Kelompok kami telah mencairkan anggaran bantuan bagi kelompok pertanian sebesar Rp. 27 juta per kelompok. Tetapi, setelah dicairkan pada pertengahan bulan Februari 2016 ini, kami pun diwajibkan untuk menyetor dana sebesar Rp 5.400.000 per kelompok,” jelas salah satu Ketua Kelompok Pertanian di Namrole yang enggan namanya dikorbankan kepada *Siwalima*, Kamis (18/2).

Menurut sumber ini, uang-uang tersebut disetorkan langsung kepada oknum-oknum BKPP dirumahnya.

“Kami setorkan di rumah sesuai permintaan mereka. Katanya, jangan di kantor, sebab nanti ada banyak urusan administrasi yang harus diurus, sehingga kami antar langsung di rumah mereka di Desa Waenono,” terangnya.

Menurutnya, alasan dari oknum-oknum tersebut untuk biaya administrasi sebesar Rp. 500.000 dan biaya pembelian obat atau pupuk tablet di Jakarta sebesar Rp. 4.900.000.

“Ada yang ganjal dengan pemotongan ini, sebab lebih besar dari tahun lalu yang hanya dikenakan Rp. 1 juta per kelompok untuk biaya administrasi. Itu pun berdasarkan kerelaan kami untuk memberi,” terangnya.

Di tempat yang sama, salah satu ketua kelompok pertanian lainnya pun mengaku, bahwa pemotongan tersebut berlaku sama terhadap pihaknya, bahkan diduga kuat terjadi pada 130 kelompok di 13 desa di Kecamatan Namrole, Leksula dan Kecamatan Waesama.

“Bukan hanya kami di Namrole, saja yang dikenakan pemotongan, tetapi rekan-rekan kelompok lain di Waesama dan Leksula yang datang mencairkan uang tersebut di Bank pun mengaku bahwa mereka juga menyetor jumlah yang sama,” paparnya.

Lebihlanjut, dirinya menjelaskan, kelompok pertanian yang mendapatkan dana bantuan tersebar pada 13 desa, baik di Kecamatan Namrole yang terdiri dari Desa Labuang, Desa Namrinat, Desa Oki Lama, Desa Oki Baru dan Desa Leku.



Sedangkan di Kecamatan Leksula yang tersebar di Desa Leksula, Desa Ewiri dan Desa Waeturen. Dan sisanya itu di Kecamatan Waesama.

“Saya lupa nama-nama desa di Kecamatan Waesama. Tapi terbanyak itu di Kecamatan Waesama. Dimana, pada setiap desa itu ada 10 kelompok, sehingga kalau 13 desa berarti ada 130 desa,” terangnya.

Lanjutnya lagi, jika oknum-oknum ini telah memberlakukan pemotongan dengan nilai yang sama pada semua kelompok, maka dipastikan mereka telah meraup keuntungan untuk memperkaya diri dengan dana sebesar Rp. 702 juta. Sebab, pada setiap desa, diduga oknum-oknum ini telah melakukan pemotongan sebesar Rp. 54 juta.

“Ya kita bisa jumlahkan saja, kalau 1 kelompok dikenakan pemotongan sebesar Rp. 5.400.000, maka 1 desa telah dikenakan pemotongan sebesar Rp. 54 juta dan 130 desa telah dikenakan pemotongan sebesar Rp. 702 juta. Wah, sungguh nilai yang fantastis jika dibagi untuk tiga orang untuk memperkaya diri mereka. Sebab, kami yakin bahwa, pemotongan ini bukan atas inisiatif para oknum yang hanya staf saja tetapi pastinya ada arahan langsung dari pimpinan.

Terkait itu, kelompok-kelompok pertanian ini meminta, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku dan pihak Polda Maluku segera mengusut kasus ini.

“Praktek-praktek korupsi seperti ini harusnya tak dibiarkan bertumbuh subur di Kabupaten Bursel dan dibiarkan begitu saja oleh penegak hukum, baik itu Kejati Maluku maupun Polda Maluku. Kami minta agar kasus ini segera diusut tuntas,” pinta mereka.

Sementara itu, di tempat berbeda, salah satu staf BKPP Kabupaten Bursel yang enggan namanya dikorbankan kepada *Siwalima*, Kamis (18/2) mengaku, turut kaget dengan aksi liar sejumlah oknum itu.

“Wah, ada yang aneh jika telah terjadi pemotongan sebesar Rp. 5.400.000 per kelompok. Sebab sangat tidak wajar jika ada pemotongan sebesar itu,” kata staf tersebut.

Lebih lanjut, katanya lagi, jika pemotongan tersebut dilakukan dengan alasan administrasi dan untuk membeli obat tablet.

“Kalau untuk biaya administrasi itu mungkin bisa dimaklumi dan atas kerelahaan tiap-tiap kelompo saja. Tetapi, kalau untuk membeli obat atau pupuk dalam bentuk tablet di Jakarta, ini yang tidak wajar,” tandasnya. **(S-35)**



Friday, 19 February 2016

Diduga Dana SOLID Kelompok Pertanian Bursel Disunat

Namrole - Diduga, dana Solid bagi 130 kelompok pertanian di Kabupaten Buru Selatan (Bursel) disunat, oleh oknum-oknum di Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan kabupaten setempat.

Sejumlah oknum BKPP Bursel tersebut diduga terlibat dalam aksi penyunatan dana Solid bernilai ratusan juta rupiah, dengan cara menyetor anggaran sebesar sebesar

Rp 5.400.000 pasca pencairan anggaran kepada para oknum-oknum tersebut.

“Kelompok kami telah mencairkan anggaran bantuan bagi kelompok pertanian sebesar Rp. 27 juta per kelompok. Tetapi, setelah dicairkan pada pertengahan bulan Februari 2016 ini, kami pun diwajibkan untuk menyetor dana sebesar Rp 5.400.000 per kelompok,” jelas salah satu Ketua Kelompok Pertanian di Namrole yang enggan namanya dikorbankan kepada *Siwalima*, Kamis (18/2).

Menurut sumber ini, uang-uang tersebut disetorkan langsung kepada oknum-oknum BKPP dirumahnya.

“Kami setorkan di rumah sesuai permintaan mereka. Katanya, jangan di kantor, sebab nanti ada banyak urusan administrasi yang harus diurus, sehingga kami antar langsung di rumah mereka di Desa Waenono,” terangnya.

Menurutnya, alasan dari oknum-oknum tersebut untuk biaya administrasi sebesar Rp. 500.000 dan biaya pembelian obat atau pupuk tablet di Jakarta sebesar Rp. 4.900.000.

“Ada yang ganjal dengan pemotongan ini, sebab lebih besar dari tahun lalu yang hanya dikenakan Rp. 1 juta per kelompok untuk biaya administrasi. Itu pun berdasarkan kerelaan kami untuk memberi,” terangnya.

Di tempat yang sama, salah satu ketua kelompok pertanian lainnya pun mengaku, bahwa pemotongan tersebut berlaku sama terhadap pihaknya, bahkan diduga kuat terjadi pada 130 kelompok di 13 desa di Kecamatan Namrole, Leksula dan Kecamatan Waesama.

“Bukan hanya kami di Namrole, saja yang dikenakan pemotongan, tetapi rekan-rekan kelompok lain di Waesama dan Leksula yang datang mencairkan uang tersebut di Bank pun mengaku bahwa mereka juga menyetor jumlah yang sama,” paparnya.

Lebihlanjut, dirinya menjelaskan, kelompok pertanian yang mendapatkan dana bantuan tersebar pada 13 desa, baik di Kecamatan Namrole yang terdiri dari Desa Labuang, Desa Namrinat, Desa Oki Lama, Desa Oki Baru dan Desa Leku.



Sedangkan di Kecamatan Leksula yang tersebar di Desa Leksula, Desa Ewiri dan Desa Waeturen. Dan sisanya itu di Kecamatan Waesama.

“Saya lupa nama-nama desa di Kecamatan Waesama. Tapi terbanyak itu di Kecamatan Waesama. Dimana, pada setiap desa itu ada 10 kelompok, sehingga kalau 13 desa berarti ada 130 desa,” terangnya.

Lanjutnya lagi, jika oknum-oknum ini telah memberlakukan pemotongan dengan nilai yang sama pada semua kelompok, maka dipastikan mereka telah meraup keuntungan untuk memperkaya diri dengan dana sebesar Rp. 702 juta. Sebab, pada setiap desa, diduga oknum-oknum ini telah melakukan pemotongan sebesar Rp. 54 juta.

“Ya kita bisa jumlahkan saja, kalau 1 kelompok dikenakan pemotongan sebesar Rp. 5.400.000, maka 1 desa telah dikenakan pemotongan sebesar Rp. 54 juta dan 130 desa telah dikenakan pemotongan sebesar Rp. 702 juta. Wah, sungguh nilai yang fantastis jika dibagi untuk tiga orang untuk memperkaya diri mereka. Sebab, kami yakin bahwa, pemotongan ini bukan atas inisiatif para oknum yang hanya staf saja tetapi pastinya ada arahan langsung dari pimpinan.

Terkait itu, kelompok-kelompok pertanian ini meminta, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku dan pihak Polda Maluku segera mengusut kasus ini.

“Praktek-praktek korupsi seperti ini harusnya tak dibiarkan bertumbuh subur di Kabupaten Bursel dan dibiarkan begitu saja oleh penegak hukum, baik itu Kejati Maluku maupun Polda Maluku. Kami minta agar kasus ini segera diusut tuntas,” pinta mereka.

Sementara itu, di tempat berbeda, salah satu staf BKPP Kabupaten Bursel yang enggan namanya dikorbankan kepada *Siwalima*, Kamis (18/2) mengaku, turut kaget dengan aksi liar sejumlah oknum itu.

“Wah, ada yang aneh jika telah terjadi pemotongan sebesar Rp. 5.400.000 per kelompok. Sebab sangat tidak wajar jika ada pemotongan sebesar itu,” kata staf tersebut.

Lebih lanjut, katanya lagi, jika pemotongan tersebut dilakukan dengan alasan administrasi dan untuk membeli obat tablet.

“Kalau untuk biaya administrasi itu mungkin bisa dimaklumi dan atas kerelahaan tiap-tiap kelompo saja. Tetapi, kalau untuk membeli obat atau pupuk dalam bentuk tablet di Jakarta, ini yang tidak wajar,” tandasnya. (S-35)



Monday, 22 February 2016

Diduga Sunat Dana Solid

YPPM Ngaku untuk Beli Pupuk

Namrole - Diduga dana Solid untuk ratusan kelompok pertanian di Kabupaten Buru Selatan (Bursel) disunat, Yayasan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (YPPM) mengaku, dana tersebut untuk kelola secara baik bagi kebutuhan petani terutama beli pupuk dan bibit.

Menurut, Direktur YPPM Maluku, Abdulgani Fabanjo kepada *Siwalima* via telepon selulernya, Jumat (19/2) anggaran dana solid milik 130 kelompok petani di Kabupaten Bursel, bukanlah disunat tetapi dilakukan pungutan setelah pencairan anggaran.

“Uang itu bukan sebenarnya dipotong, tapi dipungut, karena inikan proses pendampingan dan pemberdayaan oleh LSM. Jadi, uang itu dipungut untuk kepentingan pembelian pupuk,” jelas Direktur YPPM Maluku, Abdulgani Fabanjo kepada *Siwalima* via telepon selulernya, Jumat (19/2) menanggapi pemberitaan soal dana tersebut telah disunat.

Kata dia, dana ratusan juta milik 130 kelompok pertanian tersebut bukan dipakai untuk memperkaya pihak pengelola ataupun pendamping dana Revolving Fund (RF) tersebut. Namun murni untuk membeli pupuk bagi kelompok pertanian tersebut.

Fabanjo menjelaskan, dalam satu kelompok terdiri dari 15 orang, dan saat pencairan dilakukan pemotongan per orang sebesar Rp. 330.000 atau per kelompok sebesar Rp. 4.950.000.

“Dalam satu kelompok itu ada 15 orang dan masing-masing orang berhak memperoleh dana sebesar Rp. 1.200.00 dan yang dipungut itu sebesar Rp. 330.000 per orang atau Rp. 4.950.000 per kelompok, dimana anggaran tersebut murni untuk beli pupuk,” terang Pabanjo.

Dikatakan, jika dana tersebut diserahkan seluruhnya kepada para kelompok tani, maka pihaknya meragukan para petani tidak akan membeli pupuk.

“Kenapa dipungut untuk dibelanjakan, karena untuk kepentingan membeli pupuk. Karena kalau dikasih untuk masyarakat beli juga repot, karena mereka mau beli dimana, pasti mereka tidak akan seragam. Jadi yang dampingi adalah saya punya fasilitator, dan kita fasilitasi untuk beli pupuk saja. Jadi, tidak benar disunat untuk memperkaya diri,” tandasnya.

Ia mengaku, terkadang para petani juga kurang paham tentang mekanisme yang ada, sehingga salah dalam memberikan tanggapan atas proses yang terjadi.

“Mereka kadang tahu bahwa, dapat uang itu harus keseluruhan tanpa tahu ada persyaratan-persyaratan tertentu untuk beli bibit, beli pupuk. Tetapi, kalau kita lepas semua, maka tidak ada yang betul semua. Makanya kita fasilitasi untuk kumpul dan belanjakan pupuk untuk diserahkan kepada mereka,” ujarnya.



Kendati demikian, ia mengaku senang karena media turut mengawasi proses penyaluran dana itu kepada masyarakat.

“Saya senang juga karena ada yang mengawal dan punya kepedulian. Bagusnya seperti ini juga supaya semua orang punya mata terbuka bahwa, ada program dan ada dana yang dikelola untuk masyarakat. Jadi, kontrol itu penting,” tuturnya.

Sementara itu, Asisten Monitoring dan Evaluasi YPPM, Sukri Saha dan Asisten Gender Eny Latuwael kepada *Siwalima* di Namrole, Sabtu (20/2) mengaku, pihaknya melakukan pemotongan, tapi bukan untuk memperkaya diri, melainkan untuk membeli pupuk bagi para petani.

“Jadi, kita fasilitasi saja. Sebab dari evaluasi orang barat tahun lalu, ternyata ada produksi yang menurun karena mereka tidak pakai pupuk. Jadi, kali ini kita potong untuk beli pupuk, dan dalam satu atau dua hari kedepan pupuknya sudah ada dan akan diantar sendiri oleh Pak Gani (Koordinator YPPM-red),” kata Latuwael.

Lebih lanjut Latuwael menjelaskan, pupuk yang akan dibeli dalam bentuk tablet itu terdiri dari Custombio 3 tablet dengan harga per tablet Rp. 75.000, Super Compos 1 tablet Rp. 45.000, Maxgrow 1 tablet Rp. 45.000, Insectisida organic 1 tablet Rp. 45.000.

“Jadi pemotongan untuk beli pupuk ini satu orang Rp. 330.000 dan satu kelompok itu Rp. 4.950.000. Itu untuk beli pupuk dan bukan untuk memperkaya diri kami. Jujur, itu untuk beli pupuk,” ungkap Latuwael.

Kata dia, tidak ada skenario pungutan liar yang dipraktekan pihaknya, termasuk tidak ada keterlibatan oknum-oknum di Ketahanan Pangan Bursel yang juga koordinator Solid.

Hal senada juga diungkapkan Saha. Ia memastikan, dalam waktu dekat pupuk tersebut pun telah tiba di Namrole dan akan dibagikan kepada para petani.

Hingga saat ini, lanjutnya, baru 100 kelompok pada 10 desa di Kecamatan Namrole dan Waesama yang telah melakukan pencairan dana itu. Sedangkan untuk tiga desa di Kecamatan Leksula yakni, Desa Leksula, Ewiri dan Waeturen belum melakukan pencairan. **(S-35)**